

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh pegawai pelaksana BPK yang dituntut menjunjung tinggi independen, integritas dan profesional. BPK wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK sendiri memiliki tujuan agar terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kepentingan sehingga tercipta birokrasi yang modern di BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Sehingga tujuan dari BPK sendiri dapat terwujud yaitu pengelolaan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan hasil pemeriksaan yang bermutu sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Auditor adalah salah satu profesi yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan menarik kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan sebuah *audit judgement* dimana auditor mengumpulkan bukti-bukti terkait lalu

mengkomunikasikan laporan temuan auditor dalam bentuk laporan audit. *Audit judgement* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Taylor,2000 dalam Pramono,2007). Karenanya *judgement* memberikan pengaruh positif terhadap pembuatan keputusan yang diambil.

Adapun tabel dugaan kasus korupsi di BPK RI sebagai berikut :

Tabel 1.1
Dugaan Kasus Korupsi di BPK RI

No.	Dugaan Kasus Korupsi	Pihak yang Terkait	Penyebab	Sumber
1.	Kasus penyuapan yang anggota (KPU) Komisi Pemilihan Umum kepada anggota BPK saat pemeriksaan pemilu di tahun 2004	Mulyana W.Kusumah	Pembatasan ruang lingkup	http://www.suara-merdeka.com
2.	Oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat diberikan suap oleh PEMKOT Bekasi	Suharto, Herry Lukmantohari, dan Herry Suparjan.	Pengurangan sampel untuk perubahan opini dari WDP ke WTP	http://www.berita-satu.com/

Kasus korupsi yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan melibatkan oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terjadi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung. Laporan itu dilayangkan LSM Monitoring Community (MC) Jawa Barat. Korupsi yang dilakukan Dinkes Bandung itu ditaksir mencapai Rp 100 M dalam periode 2008-2011 yang menyebut adanya keterlibatan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang telah mengkondisikan ketika melakukan pemeriksaan. Auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat menjadikan sampel bidang

tertentu saja agar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK terhadap dinas tersebut selalu baik (pikiran rakyat online).

Seperti diketahui dalam menjalankan tugasnya auditor menerima penugasan dari klien, dan penugasan itu sifatnya berbeda-beda. Biasanya, kebanyakan penugasan dari klien dan penugasan audit umum (*general audit*), bukan *management audit* ataupun *special audit*. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) jelas disebutkan bahwa tujuan audit umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Media Akuntansi,2001). Fenomena perbedaan persepsi tentang tanggung jawab auditor di atas, menggambarkan bahwa telah terjadi kesenjangan harapan audit antara pemakai jasa (klien) dengan pemberi jasa (auditor).

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh auditor adalah dilema etika dalam menentukan hasil dalam proses audit. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan klien dan keseluruhan laporan disajikan secara wajar dan klien menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan.

Auditor dalam proses audit memberikan opini dengan *judgement* yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi oleh auditor sehubungan *judgement* yang dibuatnya. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan bahwa *audit judgement* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan (Institut Akuntan Publik Indonesia,2001).

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pembuatan *audit judgement* (Siti dkk,2007), mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi baik bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit sedangkan faktor non teknis meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah faktor gender dan tekanan ketaatan juga akan mempengaruhi persepsi auditor.

Perilaku individu yang mempengaruhi *audit judgement* banyak menarik perhatian dari praktisi akuntansi maupun akademisi. Namun demikian, meningkatnya perhatian perhatian tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku dimana dalam banyak penelitian hal tersebut justru tidak menjadi fokus utama (Meyer,2001).

Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *audit judgement* seiring dengan terjadinya perubahan pada pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Gender dalam hal ini tidak hanya diartikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat keputusan. Dalam hal memberikan *judgement*, auditor selalu dihadapkan pada informasi yang nantinya akan diproses dan melahirkan *audit judgement*.

Gender sebagai faktor individual dapat berpengaruh terhadap kinerja yang memerlukan *judgement* (Zulaikha,2006). Hal ini dikarenakan wanita memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan pria untuk membedakan dan mengintegrasikan keputusan. Rugger dan King (1992) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria.

Dalam melaksanakan proses audit tak jarang auditor akan mengalami tekanan kerja, seperti adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksanya. Bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi dan berpegang teguh pada etika profesi dan standar auditing. Namun tidak jarang muncul dilema etika ketika auditor berusaha melakukan tugasnya dan di lain pihak memenuhi perintah atasan maupun entitas yang diperiksa. Situasi seperti inilah yang membuat auditor mengalami proses yang dilematis.

Selain itu, tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan juga dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan mempengaruhi kualitas audit serta pertimbangan (*judgement*) auditor. Tekanan

klien tersebut dapat berupa tekanan untuk memberikan opini atas laporan keuangan auditan sesuai dengan yang diharapkan klien.

Dalam penelitian Siti (2007) menjelaskan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan sumber untuk mempengaruhi perilaku di sekitarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power*. Milgram dalam Hartanto (2001) mengatakan bahwa bawahan yang mendapatkan tekanan ketaatan akan berperilaku autonomis, dimana bawahan yang biasanya berperilaku mandiri akan berubah menjadi perilaku agen yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan profesionalisme yang menurun.

Penelitian yang berhubungan dengan *audit judgement* dilakukan oleh Elisabeth dan Sugeng tentang Pengaruh Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan dan Pengalaman Auditor terhadap *audit judgement*, menyatakan bahwa tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, pengetahuan dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *judgement*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Anugrah dan Indira (2012) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Judgement* (Studi kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Menunjukkan bahwa gender dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap *judgement* dan tidak didukung oleh tekanan ketaatan yang berpengaruh negatif. Diduga karena perempuan lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki.

Namun penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Jamilah (2007) tentang Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas Terhadap *Audit Judgement*, menyatakan bahwa gender dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja *audit judgement*. Hal ini dikarenakan pertimbangan audit seseorang tidak dipengaruhi perbedaan perilaku peran, mentalitas dan emosional sedangkan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgement* karena pada tingkat kesulitan yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi pertimbangan auditor.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmi (2011) tentang Analisis Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Terhadap Pembuatan *Audit Judgement*, mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement* sedangkan tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgement*. Sedangkan menurut Zulaikha (2006) tentang Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman auditor terhadap *Audit Judgement* (Sebuah kajian terhadap Persediaan) menyatakan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas dan penjelasan penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pengujian mengenai *audit judgement* penting dilakukan karena dalam standar pemeriksaan BPK, auditor diwajibkan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menilai hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang masalah tersebut melalui studi di BPK Perwakilan Jawa Barat. Maka dari itu judul

dari penelitian ini adalah : “Pengaruh Gender dan Tekanan Ketaatan Terhadap *Audit Judgement* (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana pengaruh gender dan tekanan ketaatan terhadap audit judgement. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Gender berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apakah Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan referensi pengaruh gender dan tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kinerja auditor pemerintah di waktu yang akan datang.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertimbangan audit yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji permasalahan yang terjadi seputar kinerja auditor pemerintah.